

**PENGAWASAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TERHADAP
PENGELOLAAN MUSEUM SANG NILA UTAMA DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**

Oleh: Ayang Isnaini

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M, Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Supervision can be interpreted as a process for implementing what work is planned, assessing it and if necessary correcting it with the intention that the implementation of the work is in accordance with the original plan. The Riau Provincial Cultural Office carries out guidance and supervision of the main Nila Museum. Supervision is carried out through an assessment of Museum institutions and Museum management. But supervision has not been carried out optimally by the Culture Service, because the main Nila Museum has lost some rare collections. The loss of several collections of items in the Museum is the formulation of the problem in this stud.

The purpose of the this research is to find out the supervision of the Riau Provincial Cultural Office on the main Sang Nila Museum and to find out the inhibiting factors for the Culture Service in supervising the main Sang Nila Museum in Pekanbaru City. This research approach uses a qualitative approach, the type of research used is qualitative research. Data collection techniques used in this study are interviews and documentation, of data analysis techniques used are descriptive qualitative analysis.

The result of this research is that supervision is carried out through an assessment of the institution and management of the Museum. This shows that the supervision carried out the Museum institution is in accordance with the applicable rules. By carrying out supervision of government agencies will not be separated from obstacles or obstacles. In supervising th Riau Provincial Cultural Office, ther are also obstacles in supervising the main Nila Museum. One of the obstacles faced by the Riau Provincial Cultural Office is human resources. In organizing this the department experienced a shortage of staff, then the obstacle faced by the department of Cultural in supervising the Museum was the budget.

Keywords: Supervision, Culture Service, Museum

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum pasal 44 ayat 1 dan 2, menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Museum secara langsung. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan menteri dibantu oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Dengan kata lain Gubernur memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Museum. Pasal 45 ayat 2 menyebutkan pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap kelembagaan museum, pengelolaan koleksi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan museum, pemanfaatan museum. Menurut Pasal 46 ayat 2 pengawasan dilakukan melalui penilaian terhadap kelembagaan museum dan pengelolaan Museum. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengawasan yang dilakukan terhadap kelembagaan museum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan harus menjadi pelengkap pelaksanaan tugas dan rencana dengan selalu berorientasi pada pencapaian tugas, dan pengawasan yang terjadi sehingga tindakan perbaikannya dapat pula dilakukan dengan sesegera mungkin agar dapat terhindar dari hal – hal yang tidak diharapkan. Jadi pengawasan yang baik tidak hanya dilakukan sejak kegiatan pekerjaan tersebut dimulai akan tetapi sampai kepada hasil dari pekerjaan itu, dilakukan untuk menghindari kesalahan - kesalahan yang lebih fatal lagi.¹

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2010, pasal 1 ayat 1 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Banyaknya benda budaya maupun benda yang menjadi sumber daya alam yang patut dilestarikan di Riau, menyebabkan pemerintah daerah Riau melakukan pengumpulan benda-benda tersebut secara bertahap sejak tahun anggaran 1977/1978. Pembangunan gedung museum sendiri dimulai pada tahun anggaran 1984/1985. Pada awal berdirinya, museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Riau. Peresmian dilaksanakan pada 9 Juli 1994 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Edi Sedyawati.

Sang Nila Utama adalah nama yang diberikan kepada museum ini yang berasal dari nama seseorang yang berkuasa sekitar abad XIII masehi dipulau bintan. Di dalam museum sang nila utama ini terdapat berbagai macam koleksi benda cagar budaya dari berbagai daerah yang ada di Riau. Benda-benda, tersebut diklasifikasikan penggolongan koleksi berdasarkan kriteria yang bersifat konvesi (kesepakatan yang tidak tertulis).

¹Ihsana El Khuluqo, “Pengaruh Pengawasan Kinerja Terhadap Produktivitas Kerja pada Biro

Umum di Badan Narkotika Nasional” (Pascasarjana UHAMKA, 2017), Hal.61

Tabel 1.1 Koleksi Barang Museum Sang Nila Utama

Jenis dan Jumlah Koleksi		
No	Jenis	Jumlah Koleksi
1	Geologi (Tentang bumi, termasuk komposisinya)	1115
2	Biologi (tentang kehidupan)	29
3	Etnografika (Benda yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu)	1.820
4	Arkeologi (Benda yang ditinggalkan pada masa lampau)	62
5	Historika (benda koleksi penelitian sejarah)	16
6	Numismatika/Heraldika (Benda kuno seperti mata uang)	1.176
7	Filologika (Teks-teks sastra dan catatan tertulis)	68
8	Keramologika (benda yang berupa keramik atau gerabah)	1.696
9	Seni Rupa (seni lukis, seni kerajinan tangan dan seni patung)	31
10	Teknologika (teknologi dan rekayasa)	14
JUMLAH		6027

Sumber: Dinas kebudayaan Provinsi Riau tahun 2019

Pengelolaan fasilitas wisata di Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau belum memadai, mencukupi dan belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan jenis fasilitas yang masih sedikit, dan ada beberapa fasilitas yang tidak bisa digunakan dengan baik, serta kondisi fasilitas-fasilitas yang masih kurang layak.

Tabel 1.3 Fasilitas Museum Sang Nila Utama

No	Fasilitas	Kondisi
1	CCTV	Tidak Berfungsi
2	Monitor Deskripsi	Tidak Berfungsi
3	Komputer	1 Berfungsi 1 Tidak Berfungsi
4	Monitor CCTV	Tidak Berfungsi
5	Mobil Museum	Berfungsi

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2019

Pada tahun 2017 Museum Sang Nila Utama mengalami hilangnya beberapa barang berharga. Adapun

barang-barang yang hilang berupa keris melayu, pedang melayu sondang, piring seladon emas, kendi VOC, kendi janggut. Hilangnya barang tersebut tak terlepas dari pengawasan Dinas Kebudayaan dalam mengawasi Museum tersebut. Hilangnya beberapa barang koleksi Museum akan berpengaruh pada tingkat pengunjung Museum.

Kurangnya pengawasan terhadap barang-barang koleksi yang terdapat pada Museum Sang Nila Utama mengakibatkan sebagian koleksi barang-barang tersebut hilang. Hilangnya barang-barang tersebut tak terlepas dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Museum itu sendiri.

Dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam mengawasi fasilitas sarana dan prasana, fisik maupun non fisik. Sehingga koleksi yang terdapat pada Museum Sang Nila Utama dapat terjaga dengan baik. Maka dengan adanya pengawasan yang baik minat masyarakat akan meningkat untuk berkunjung pada

Museum Sang Nila Utama di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“**Pengawasan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Terhadap Pengelolaan Museum Sang Nila Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2018**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terhadap pengelolaan Museum Sang Nila Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2018?
2. Apa faktor penghambat pengawasan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terhadap pengelolaan Museum Sang Nila Utama tahun 2018

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terhadap pengelolaan Museum Sang Nila Utama di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terhadap pengelolaan Museum Sang Nila Utama.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pengawasan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terhadap

pengelolaan museum sang nila utama di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak instansi terkait, khususnya Dinas Kebudayaan, khususnya pada pengawasan museum sang nila utama di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Kerangka Teori

1. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksana pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jelas kiranya, dari berbagai batasan pengawasan di atas bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.²

Yang dimaksud dengan pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan terhadap pemerintah.³ Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan,

²Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 173

³Inu Kencana Syafiie, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: PT Pertja 1998), 59

kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.⁴

Pengawasan Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya –penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

1) Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas: (a) Pengawasan preventif dan (b) pengawasan repressif. Dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan. Pengawasan repressif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.⁵

2) Subjek Pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan itu dapat dibedakan atas: (1) Pengawasan *intern* dan (2) pengawasan *ekstern*. Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang berwenang. Suatu pengawasan ekstern,

bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan.⁶

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari urutan sebagai berikut:

a. Menetapkan alat pengukur (*standar*)

Bila bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tuas itu dapat dilaksanakan bilamana kita mempunyai alat pengukur sesuatu alat pengukur itu dinamakan alat pengukur. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan abwahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia yaitu standar atau alat pengukur dan hasil pekerjaan.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

⁴Ibid, 60

⁵Ibid, 177

⁶Ibid, 178

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga dilakukan pada Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya.

4. Jenis data dan sumber data

a. Jenis data

1. Data primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau

diwawancarai. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, skripsi serta data lainnya.

b. Sumber Data

1. Informan Penelitian

Untuk memfokuskan pencarian data yang dimaksud, penulis menggunakan Informan yang berjumlah 6 Orang.

Tabel 1.4 Informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Dra. Asmiati	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	1
2.	Lolly Febrina, S.E, M.Si	Kasubbag Tata Usaha UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	1
3.	Edy Yulisman, S.E, M.Si	Kepala Seksi Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	1
4.	Tutik Sumarni	Staff Tata Usaha	1
5.	Happy Rosalina, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	1
6.	Dra. Indrawati	Kepala Seksi dan Nilai Budaya	1

Sumber: data olahan penulis tahun 2019

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam suatu penelitian, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada

si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, pengumpulan data yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Kebudayaan.

6. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu

dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dilakukan melalui penilaian terhadap kelembagaan dan pengelolaan Museum. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengawasan yang dilakukan terhadap kelembagaan Museum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah direncanakan, menilainya, dan apabila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Subjek Pengawasan

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bertanggung jawab langsung dalam mengawasi UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, dalam Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang bertanggung jawab terhadap Museum yaitu UPT Museum. Pihak Dinas Kebudayaan melakukan kegiatan rutin setiap bulannya dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya.

Objek Pengawasan

Dalam Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang bertanggung jawab terhadap Museum yaitu UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya. Museum Sang Nila Utama merupakan salah satu objek wisata budaya serta sejarah yang dapat memberikan gambarasn mengenai corak kebudayaan melayu. Di dalam Museum Sang Nila Utama ini terdapat berbagai macam koleksi benda cagar budaya dari berbagai daerah yang ada di Riau.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 pasal 46 menyebutkan bahwa pengawasan dilakukann melalui penilaian terhadap kelembagaan Museum dan pengelolaan Museum. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengawasan yang dilakukan terhadap kelembagaan Museum dan pengelolaan Museum belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan koleksi pihak UPT wajib mengelola koleksi baik yang berada di dalam maupun luar ruangan. Karena di dalam Museum masih terdapat beberapa koleksi barang yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini ada yang mengalami kerusakan berat serta kerusakan ringan.

Waktu Pengawasan

Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. pihak Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan diadakan tiap 3 bulan sekali, pengawasan dan pemantauan ini dilihat dari laporan kinerja pegawai.

Proses Pengawasan

Menetapkan Alat Ukur

Menetapkan alat ukur (*standard*), yaitu sebagai alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan. Dengan demikian, atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi hasil standar pekerjaan

bawahan tersebut.⁷Pada Dinas Kebudayaan standar ini berupa peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015.

Mengadakan Penilaian (Evaluate)

Penilaian atau evaluasi merupakan penentuan derajat kualitas berdasarkan indikator yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pekerjaan. Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadi penyimpangan yang sama.

Pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengadakan penilaian terhadap UPT Museum dan Taman Budaya selaku penanggung jawab Museum. Penilaian ini berupa laporan yang diberikan pihak UPT misalkan laporan kunjungan yang terdapat pada Museum pada tiap tahunnya.

Tabel 3.3 Laporan Kunjungan pada Museum Sang Nila Utama

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2017	21.081 orang
2	2018	45.534 orang
3	2019	21.610 orang

Sumber: Data olahan penulis tahun 2019

⁷Rio Ferdinan, "Pengaruh pengawasan terhadap kualitas pelayanan pegawai dalam pembuatan naskah di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sambas", Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015. Hal, 8

Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action)

Mengadakan tindakan perbaikan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dijadikan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Tindakan perbaikan ini juga bertujuan agar pengawasan dapat terealisasi. Mengadakan tindakan perbaikan pada permasalahan yang dialami pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau kurang terlaksana. Hal ini digambarkan dengan adanya kehilangan koleksi-koleksi bersejarah pada Museum Sang Nila Utama. Hal ini akan mengakibatkan kerugian besar bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terutama pihak UPT Museum selaku yang bertanggung jawab terhadap Museum. Dengan adanya permasalahan ini pihak Dinas Kebudayaan serta UPT Museum dan Taman Budaya selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap Museum dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi Museum harus lebih dalam melakukan tindakan perbaikan. Pihak UPT Museum dan Taman Budaya telah melakukan tindakan perbaikan dalam mengatasi permasalahan yang ada di Museum yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib dalam menangani kasus kehilangan beberapa koleksi yang terdapat di dalam Museum.

Faktor penghambat pengawasan Dinas Kebudayaan terhadap Pengelolaan Museum Sang Nila Utama

Kendala yang dihadapi pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau salah satunya yaitu sumber daya manusia. Dalam pengorganisaian ini pihak Dinas mengalami kekurangan karyawan, ini disebabkan karena keahlian dalam kelompok konservasi dan preparasi sangat sulit untuk didapatkan. Ada

beberapa faktor yang dapat dilihat dari sumber daya manusia ini, salah satunya yaitu tingkat pendidikan.

Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam mengawasi Museum adalah pendanaan. Minimnya pendanaan yang didapatkan maka akan berpengaruh terhadap tingkat pengawasan pihak UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya terhadap Museum.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.** Pengawasan yang dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terhadap pengelolaan Museum Sang Nila Utama belum berjalan secara maksimal. Pengawasan dilakukan melalui penilaian terhadap kelembagaan dan pengelolaan Museum. Pihak Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan diadakan tiap 3 bulan sekali. Pengawasan dan pemantauan ini dilihat dari laporan kinerja pegawai. Dalam melakukan proses pengawasan pihak Dinas Kebudayaan menetapkan alat ukur untuk mengetahui standar yang telah ditetapkan, standar itu berupa peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2015. Pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau juga mengadakan penilaian terhadap UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman budaya selaku penanggung jawab Museum. Penilaian ini berupa laporan yang diberikan pihak UPT misalkan laporan kunjungan pada Museum tiap tahunnya. Dalam mengatasi permasalahan pihak Dinas Kebudayaan melakukan tindakan perbaikan, pada kasus hilangnya beberapa koleksi barang yang

ada di Museum pihak Dinas Kebudayaan melaporkan kepada pihak berwajib.

- 2.** Faktor yang mempengaruhi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam mengawasi Museum Sang Nila Utama adalah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan bidang-bidangnya, serta jumlah pegawai yang masih kurang. Selain itu pendanaan yang minim juga menjadi faktor yang mempengaruhi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam mengawasi Museum Sang Nila Utama.

1.2 Saran

- 1.** Melakukan peningkatan dalam melakukan pengawasan, serta meningkatkan dalam segi keamanan pada Museum Sang Nila Utama sehingga koleksi barang-barang yang berada di dalam Museum menjadi lebih aman dan juga peningkatan keamanan dari dalam Museum juga diperlukan melalui kamera pemantau agar semua koleksi yang berada di dalam MuseumSang Nila Utama aman.

- 2.** Pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau lebih gencar lagi melakukan promosi-promosi lewat media sosial agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengenal Museum Sang Nila Utama. Melakukan sosialisasi ke sekolah yang ada di Pekanbaru untuk menarik minat pengunjung.

- 3.** Pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau harus meningkatkan sarana dan prasarana yang terdapat di dalam Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau, agar para pengunjung merasa nyaman saat melakukan kunjungan ke Museum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

Brantas, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta:Bandung

- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah
Pengantar Manajemen (Jakarta: Prenadamedia Group 2015)
- George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999)
- Hasan Iqbal, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002)
- Hasibuan Melayu S.P 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafii, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: PT Pertja 1998)
- Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006)
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ninik Widyanti, Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, (Jakarta: Bumi Aksara 1987)
- Silalahi. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No.11 tahun 2010, pasal 1 ayat 1 Tentang Cagar Budaya
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pasal 1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum Pasal 44 Ayat 1 dan 2
Peraturan Gubernur Riau No 4 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
- Bahan Bacaan lainnya:**
Arieflukmanfebriantoamirudin, “*Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Lembaga Eksekutif Di Daerah*” (Universitas Jember, 2014)
Bambang Semedi (Widya iswara Pusdiklat Bea dan Cukai, periode 10 Mei 2013)
Erick Try Putra Benawan Dkk, “*Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan)*” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018
Ihsana El Khuluqo, “*Pengaruh Pengawasan Kinerja Terhadap Produktivitas Kerja pada Biro Umum di Badan Narkotika Nasional*” (Pascasarjana UHAMKA, 2017)
Martina Butar-Butar, “*Pelestarian Benda Cagar Budaya di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau*” Volume 2 No 1 Januari 2015
Nazar Ashari, “*Pengelolaan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017*”, Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018.

Tharra Amalia, “*Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Di Museum Daerah Sang Nila Utama Kota Pekanbaru*” Vol.4 No.1 (Februari) 2017